

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah utama yang dialami hampir diseluruh negara, termasuk negara berkembang. Tanda-tanda kemiskinan di negara berkembang diantaranya jumlah pengangguran yang semakin meningkat, perkembangan yang lambat, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan. Hal tersebut menjadi awal dari masalah kemiskinan yang terjadi (Mulyadi, 2017). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus diberantas habis sampai tuntas (Ardito, 2017).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 total penduduk miskin yang ada di Indonesia sebanyak 25,14 juta orang. Data ini dikalkulasikan dari jumlah penduduk miskin yang ada di kota dan desa. Data tersebut memaparkan bahwa jumlah penduduk miskin di pulau Sumatera sebesar 5.851,29 ribu orang, pulau Bali dan Nusa Tenggara 2.046,13 ribu orang, pulau Kalimantan 974,19 ribu orang, Sulawesi 2.009,85 ribu orang, Maluku dan Papua 1.540,14 ribu orang, dan kemiskinan paling tinggi berada di pulau Jawa dengan jumlah 12.723,12 ribu orang (BPS, 2018).

Pulau Jawa merupakan pulau terbesar ke-5 se Indonesia. Pulau Jawa sendiri memiliki 6 provinsi yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Meskipun menempati posisi ke-5, penduduk yang berada di pulau Jawa lebih

banyak dan masih mendominasi menjadi pusat kegiatan perekonomian di Indonesia (BPS, 2019). Berikut data penduduk miskin yang ada di beberapa daerah di pulau Jawa.

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Menurut Provinsi September 2018–Maret 2019

Provinsi	Presentase Penduduk Miskin Pulau Jawa					
	Perkotaan		Pedesaan		Total	
	Sep'17	Mar'18	Sep'17	Mar'18	Sep'17	Mar'18
DKI Jakarta	3,55	3,47	–	–	3,55	3,47
Jawa Barat	6,33	6,03	10,07	9,79	7,25	6,91
Banten	4,24	4,12	7,67	7,49	5,25	5,09
Jawa tengah	9,67	9,20	12,80	12,48	11,19	10,80
D.I Yogyakarta	10,73	10,89	14,71	13,89	11,81	11,70
Jawa Timur	6,97	6,84	15,21	14,43	10,85	10,37

Sumber: BPS, 2019

Table di atas, Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terendah sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi sepulau Jawa yaitu sebesar 11,70% atau 448,47 ribu jiwa. Padahal provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong sebagai daerah yang memiliki luas wilayah paling kecil dibanding ke-enam provinsi lainnya di pulau jawa yaitu 3.185,80 kilometer atau sekitar nol koma tujuh belas persen dari luas wilayah Indonesia.

Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibandingkan bulan Februari tahun sebelumnya. Penduduk yang bekerja dan pengangguran menjadi bagian dari pembentuk angkatan kerja. Pada bulan Februari 2019, ada sekitar 129,36 juta orang yang berstatus bekerja dan sekitar 6,82 juta orang menjadi pengangguran. Pada tahun yang sebelumnya, jumlah penduduk yang berstatus bekerja mengalami

kenaikan menjadi 2,29 juta orang, sedangkan pengangguran semakin berkurang menjadi lima puluh ribu orang (BPS, 2019). Peningkatan jumlah angkatan kerja harus sejalan dengan menurunnya jumlah pengangguran, sehingga kondisi perekonomian semakin baik.

Kemiskinan dapat dipengaruhi ekonomi yang bertumbuh tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB sebagai tolak ukur apakah pemerintah sudah berhasil dalam mengelola sumber daya dan dapat dipergunakan untuk merencanakan serta mengambil keputusan dalam mengurangi jumlah kemiskinan (Basuki dan Gayatri, 2009). Pertumbuhan ekonomi harusnya dapat memberikan manfaat terutama kepada penduduk miskin. Negara harusnya mampu menjamin arus kekayaan dari golongan kaya pada golongan miskin. Hal yang tersebut dapat dilakukan dengan adanya kebijakan-kebijakan agar ekonomi, sosial, dan politik menjadi stabil (Prasetyoningrum dan Sukmawati, 2018).

Kinerja perekonomian Yogyakarta saat ini menunjukkan gerak yang fluktuatif. Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan II-2019 terhadap triwulan I-2019 mengalami kontraksi sebesar 0,04. Selain itu kontribusi PDRB provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik terhadap pulau Jawa maupun terhadap jumlah 34 provinsi posisinya relatif kecil. Kontribusi terhadap Pulau Jawa sebesar 1,46 persen, sedangkan bila dilihat kontribusinya terhadap total 34 provinsi sebesar 0,86 persen, menurun 0,03 poin dibandingkan triwulan I-2019 (BPS, 2019).

Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas rendah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah kemiskinan semakin banyak. Kualitas SDM dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM mengakibatkan rendahnya produktifitas kerja dari penduduk. Apabila produktifitas rendah maka akan mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan. Apabila perolehan pendapatan rendah maka akan mengakibatkan jumlah kemiskinan meningkat (Saputra, 2011). Salah satu faktor yang paling penting dalam membangun IPM yaitu melalui pendidikan. Semakin baiknya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, maka akan mencetak lebih banyak lagi generasi-generasi yang intelektual dan kualitas SDM menjadi lebih berkualitas sehingga dapat mempermudah rencana atau pembangunan di negara yang sudah disusun karena ketersedianya SDM yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan mengurangi kemiskinan (Arsyad, 2014).

Meskipun kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling tinggi se Jawa, akan tetapi data IPM menunjukkan hal yang berbeda. Kualitas pembangunan manusia di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin membaik. Level IPM provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 telah mencapai 79,53. Angka IPM ini berada di peringkat tertinggi kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level IPM Indonesia yang sebesar 70,81. Angka IPM provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 meningkat 0,64 poin atau

tumbuh 0,81 persen dibandingkan dengan IPM tahun 2017 (78,89) (BPS, 2018).

Selain indeks pembangunan manusia, pengangguran juga mempengaruhi kemiskinan. Dimana tingkat pendapatan menjadi salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat. Pendapatan masyarakat dapat tercapai jika mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja dengan penuh (Agustina dkk, 2018). Akses tenaga kerja yang kurang produktif terhadap lapangan yang tersedia menjadi awal masalah kemiskinan. Pengangguran yang semakin meningkat maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami peningkatan. Dampak buruk dari pengangguran adalah tingkat pendapatan masyarakat yang semakin berkurang sehingga pada akhirnya tingkat kemakmuran/kesejahteraan juga berkurang dan masyarakat akan terjebak dalam kemiskinan (Mulyadi, 2017).

Padahal dalam kitab suci QS. At Taubah ayat 105 untuk bekerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

هُدًى فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَاللَّهِ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah, ayat 105).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk

miskin. Maka dari itu penulis memberikan judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dalam penelitian akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan suatu alternatif pemikiran dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti atau Akademisi

Sebagai sarana untuk memberikan wawasan dan untuk menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi dan juga sebagai sarana sumber informasi bagi peneliti lain dengan tema yang sejenis.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini nantinya dapat melengkapi kajian-kajian mengenai pembahasan kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.